

PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYITAAN BERDASARKAN PASAL 39
DAN PASAL 46 KUHP



Diajukan oleh :
Revindo Benedic Pasali

NPM : 190513433
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYITAAN BERDASARKAN PASAL 39
DAN PASAL 46 KUHP



Diajukan oleh :
Revindo Benedic Pasali

NPM : 190513433
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2025

**HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYITAAN
BERDASARKAN PASAL 39 DAN PASAL 46 KUHP**



Diajukan oleh :

Revindo Benedic Pasali

NPM : 190513433

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal : 28 April 2025

Dosen Pembimbing,



(G. Aryadi., SH., MH.)

HALAM PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYITAAAN
BERDASARKAN PASAL 39 DAN PASAL 46 KUHP



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2025
Tempat : R.Dosen lt. 2 (Kampus 1 Hukum UAJY)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universita Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyitaan Berdasarkan Pasal 39 jo. Pasal 46 KUHAP ”. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi.
3. Rininta Gustiyani SH. MH. CLA. CTL dan Pihak kantor Advokat & RG Partner yang membantu penulis untuk memperoleh data terkait penulisan skripsi.
4. Mama dan papa , kakak Gretsya, Ika, Telly dan adik Jhosua, Ocone Gilbert ,papa Greand, papa Mirol, om Oskar, Greand, Meril, Mirol, Ketlyn Grace dan semua keluarga yang selalu mendoakan penulis di tiap kesempatan selama masa penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Semua teman-teman daerah yang berada di Yogyakarta yang selalu memberikan semangat pada saat penulisan skripsi.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam masa pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan dan penulis sangat terbuka apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya terkait dengan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 13 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a small, stylized flourish.

Revindo Benedic Pasali

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahap awal dalam rangkaian proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sekaligus guna menemukan tersangkanya. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti atas suatu tindak pidana tersebut, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyitaan. Yang selanjutnya diatur dengan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Untuk mengetahui sampai sejauhmana undang-undang mengatur mengenai penyitaan dalam proses penyidikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan menjadi 3 bagian. Pertama adalah bagaimana bentuk kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan pada tingkat penyidikan, Kedua Bagaimana prosedur penyitaan dalam proses penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dan terakhir Bagaimana konsekuensi hukum atas penyitaan yang dilakukan penyidik tanpa izin ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk menganalisis data-data yang diperoleh, maka penulis menggunakan teknis analisis yuridis kualitatif. Setelah melakukan penelitian dari permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyitaan merupakan kewenangan tunggal yang dimiliki penyidik yang bentuk dan prosedur pelaksanaannya diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Namun kewenangan yang dimiliki penyidik untuk melakukan penyitaan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Dalam Penyitaan, Berdasarkan Pasal 39 jo. Pasal 46 KUHAP*

ABSTRACT

Investigation is the initial stage in a series of criminal justice processes that aims to find and collect evidence to clarify a crime and to find the suspect. To find and collect evidence of a crime, in Article 7 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code, investigators are given the authority to conduct confiscation. Which is further regulated by the provisions of Articles 38 to 46 of the Criminal Procedure Code. To find out to what extent the law regulates confiscation in the investigation process, the author identifies the problem into 3 parts. The first is what form of authority the investigator has in conducting confiscation at the investigation level, Second, what is the procedure for confiscation in the investigation process according to the Criminal Procedure Code. And finally, what are the legal consequences of confiscation carried out by investigators without permission from the authorized head of the District Court. The writing of this thesis uses analytical descriptive research specifications using the normative legal approach method. To analyze the data obtained, the author uses qualitative legal analysis techniques. After conducting research on the above problems, the author can conclude that confiscation is the sole authority held by investigators whose forms and implementation procedures are regulated in Articles 38 to 46 of the Criminal Procedure Code. However, the authority held by investigators to conduct confiscation cannot be implemented without the approval and permission of the Head of the District Court.

Keywords : *Criminal Law Enforcement, In Confiscation, Based on Article 39 in conjunction with Article 46 of the Criminal Procedure Code*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ixx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II. PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Mengenai Pasal 39 Dan Pasal 46 KUHAP	18
B. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Pidana	22
C. Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyitaan Berdasarkan Pasal 39 Dan Pasal 46 KUHAP	28
BAB III. PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa karya ini adalah karya asli miliknya sendiri dan bukan salinan atau plagiarisme dari karya penulis lain. Apabila di kemudian hari terbukti karya ini merupakan hasil jiplakan atau plagiarisme karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi ilmiah dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Revindo Benedic Pasali